

Dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Kesejahteraan Penerima KUR di Indonesia

Rendy Bayu Adha¹

¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Indonesia

Korespondensi: rendy.adha30@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.215> | halaman: 240 - 253

Dikirim: 08-05-2023 | Diterima: 25-06-2023 | Dipublikasikan: 31-07-2023

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional dan tantangan pembangunan dunia. Meskipun pembangunan di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, namun pemerintah masih menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan, di antaranya dengan melindungi sektor-sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai masalah masih dihadapi UMKM, salah satunya adalah keterbatasan akses keuangan atau modal. Untuk itu, pembiayaan mikro seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijalankan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data Susenas BPS tahun 2020. Metode analisis *Propensity Score Matching* (PSM) digunakan untuk mengevaluasi dampak program terhadap pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan. Hasil penelitian ini menemukan adanya dampak positif dan signifikan dari program KUR terhadap pengeluaran rumah tangga penerima KUR di Indonesia. Dampak program KUR terhadap pengeluaran bukan makanan lebih besar yaitu sekitar 18,3%-28,1% dibandingkan dampaknya terhadap pengeluaran makanan sebesar 9,5%-14,2%. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dimiliki oleh rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR. Namun, analisis statistik menunjukkan bahwa program ini sendiri belum sepenuhnya berpihak pada rumah tangga miskin, terlihat dari partisipasi program didominasi oleh rumah tangga kelas menengah dan tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan program bagi rumah tangga miskin dan bagi jenis usaha produktif seperti pertanian dan masyarakat di pedesaan.

Kata kunci: kemiskinan; kesejahteraan; KUR; UMKM, PSM.

I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan dan permasalahan global, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan terjadi ketika seseorang jatuh di bawah tingkat kesejahteraan yang merupakan kebutuhan dasar (Lipton & Ravallion, 1993). Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja, melainkan juga berkaitan dengan masalah kesehatan, rendahnya akses pendidikan, sosial, budaya serta lingkungan. Menurut data *Global Multidimensional Poverty Index*, sekitar 1,2 miliar atau 19,1% penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan multidimensi, dimana 66% masyarakat miskin tinggal di negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*) (UNDP, 2022). Kemiskinan dan kesejahteraan seperti dua sisi koin (Wulandari & Rosfiantika, 2018). Program atau kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan juga dengan upaya pengentasan kemiskinan. Kenworthy (1999) menyebut bahwa tujuan utama dari kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor UMKM yang merupakan pilar terpenting dalam perekonomian nasional karena potensi dan kontribusinya yang sangat besar. Namun, sebagian besar dari UMKM dijalankan oleh individu atau rumah tangga miskin, baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sumber pendapatan tambahan. Hal ini disebabkan rumah tangga miskin sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan UMKM merupakan refleksi dari masalah kemiskinan dan pengangguran (Tambunan, 2015). World Bank (2017) menyebut bahwa UMKM memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 menyebut ada sekitar 65,4 juta UMKM, menjadikan UMKM sebagai sektor usaha terbesar yaitu mencapai 99,99% dari seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja terbesar sekitar 119,56 juta jiwa atau 96,92% dari daya serap dunia usaha dan berkontribusi besar bagi PDB nasional sebesar 60,51%. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Namun, kontribusi usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Selain kontribusinya yang besar bagi perekonomian nasional, UMKM juga menjadi salah satu solusi untuk menurunkan ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat karena memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi terutama pada masa krisis. Karena usaha mikro memiliki perputaran transaksi yang cepat, menggunakan bahan baku domestik, dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

Dengan besarnya potensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional, UMKM masih menghadapi persoalan besar yaitu masalah pembiayaan/pendanaan yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM. World Bank (2017) menyebut UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengakses pembiayaan, terutama karena ketatnya persyaratan operasional, pelaporan, dan persyaratan jaminan dari bank umum. Beberapa penelitian terdahulu menyebut bahwa pembiayaan memainkan peran penting dalam ekonomi pembangunan (Panjaitan-Dr Adisuryo & Cloud, 1999). Beberapa penelitian terdahulu menyebut bahwa kredit mikro dapat menjadi salah satu solusi bagi masalah keterbatasan akses keuangan masyarakat miskin, karena dapat digunakan untuk melakukan usaha sendiri diberbagai sektor. Kredit mikro bertujuan membuka hambatan kredit bagi rumah tangga miskin yang dapat meningkatkan pendapatan dan konsumsi rumah tangga (Khandker *et al.*, 1998; Li *et al.*, 2011), meningkatkan pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan (Quach *et al.*, 2005), dan menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan (Pitt &

Khandker, 1998).

Program KUR merupakan salah satu program pembiayaan mikro bersubsidi di Indonesia yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2007. Secara umum, tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dengan mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, dalam rangka meningkatkan pendapatan, dan lebih jauh lagi untuk membuka lapangan kerja dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. World Bank (2017) menyebut bahwa KUR merupakan salah satu program pinjaman bersubsidi terbesar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di negara-negara pasar berkembang. Sejak pertama kali diluncurkan, program KUR telah mengalami perubahan skema pemberian subsidi, dari sebelumnya berupa Imbal Jasa Penjaminan (2007-2014) menjadi skema subsidi bunga (2015-saat ini). Perubahan skema dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa kelemahan program diantaranya tingginya tingkat suku bunga yang harus ditanggung debitur. Selain itu, penyaluran KUR saat ini lebih diarahkan pada sektor produksi dengan menetapkan target kepada bank penyalur KUR untuk menyalurkan 50-60% ke sektor produksi. Hal ini disebabkan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa lainnya, dianggap dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional. Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, nilai penyaluran KUR terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah debitur maupun total penyaluran terutama setelah dilakukan perubahan skema. Jumlah debitur telah meningkat 8 kali lipat dari 1 juta debitur pada 2015, menjadi 8,43 juta debitur pada tahun 2022. Jumlah penyaluran kredit pun meningkat signifikan dari sekitar Rp22,79 triliun pada 2015, menjadi Rp365,33 triliun pada tahun 2022. Dengan semakin meningkatnya kinerja program KUR, penting untuk mengkaji bagaimana dampak program terhadap kesejahteraan penerimanya.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Kesejahteraan (*Welfare Theory*)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Teori kesejahteraan sendiri merupakan cabang filsafat ekonomi yang mempelajari bagaimana membuat keputusan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa teori mengenai kesejahteraan seperti:

- a) Teori Utilitarianisme, yang dikembangkan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1789) dan filsuf Skotlandia, John Stuart Mill. Bentham menyebut bahwa tujuan akhir dari setiap tindakan haruslah meningkatkan jumlah kebahagiaan (atau kepuasan) dalam masyarakat (Blackorby *et al.*, 2002). Menurut teori ini, kebijakan pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan menghasilkan jumlah maksimal kebahagiaan dalam masyarakat. Teori utilitarianisme memperkenalkan prinsip-prinsip moral dan etika yang memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- b) Teori ekonomi kesejahteraan klasik (*classical welfare economic theory*), yang dikembangkan oleh ekonom Inggris klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Malthus. Teori ekonomi kesejahteraan klasik memperkenalkan pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah harus memainkan peran yang lebih kecil dalam perekonomian (Timlin, 1949). Teori ini juga memperkenalkan prinsip-prinsip pasar bebas yang menekankan bahwa pemerintah

seharusnya tidak campur tangan dalam pasar dan membiarkan pasar bekerja secara alami untuk menentukan harga dan distribusi barang dan jasa (Aronsson & Lofgren, 2007).

- c) Teori kesejahteraan neoklasik (*neoclassical welfare theory*), merupakan cabang teori ekonomi kesejahteraan klasik yang dikembangkan pada tahun 1950 an dan 1960 an oleh ekonom seperti Lionel Robbins, Paul Samuelson, Gérard Debreu dan Kenneth Arrow. Menurut teori ini, kesejahteraan masyarakat dapat dilihat sebagai hasil dari produksi dan distribusi barang dan jasa yang optimal, dan teori ini fokus pada bagaimana menentukan hasil terbaik melalui mekanisme pasar (Baujard, 2013). Konsep pareto optimal diperkenalkan sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu sistem ekonomi dianggap optimal jika tidak ada lagi tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan salah satu individu tanpa menurunkan kesejahteraan individu lain.

2.2. Pembiayaan Mikro

Selama bertahun-tahun penelitian mengenai peran pembiayaan mikro telah menarik banyak peneliti maupun para pengambil kebijakan. Pembiayaan mikro mengacu pada penyediaan layanan keuangan untuk orang miskin (Nghiem *et al.*, 2007). Tambunan (2014) menyebut pembiayaan mikro sebagai layanan keuangan berskala kecil yang diperuntukkan bagi orang miskin atau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kegiatan usaha terutama pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan dari pembiayaan atau kredit mikro adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui kegiatan usaha yang bersifat informal (Hulme & Mosley, 1996) dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (Nghiem *et al.*, 2007). Untuk itu, dampak kredit mikro harus diukur dengan perubahan kesejahteraan, diantara indikator yang dapat digunakan seperti pendapatan dan pengeluaran konsumsi (sebagai proksi dari kesejahteraan ekonomi), belanja pendidikan dan kesehatan (sebagai proksi dari modal manusia) dan belanja untuk kegiatan sosial (sebagai proksi untuk modal sosial).

Dampak dari kredit mikro terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial ekonomi telah banyak dikaji di negara-negara berkembang yang sebagian besar menyimpulkan bahwa kredit mikro memainkan peran penting untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran individu atau rumah tangga yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Beberapa penelitian di Bangladesh seperti yang dilakukan Pitt dan Khandker (1998) atau Khandker *et al.* (1998) menemukan bahwa akses pada pembiayaan mikro meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama jika pinjaman diberikan kepada perempuan dan berdampak positif terhadap pengeluaran, pasokan tenaga kerja dan partisipasi sekolah (Chemin, 2008). Pembiayaan mikro juga berdampak pada pengeluaran makanan dan non makanan penerimanya (Quach *et al.*, 2005), meningkatkan pendapatan per kapita dan konsumsi per kapita (Cuong *et al.*, 2008) di negara Vietnam.

2.3. Kredit Usaha Rakyat

Program KUR merupakan salah satu program pembiayaan mikro yang dijalankan di Indonesia sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak 1970an, pemerintah telah mengeluarkan program kredit mikro seperti Program Bimbingan Massa (Bimas), yaitu kredit skala kecil bersubsidi yang disalurkan kepada petani kecil untuk meningkatkan produksi beras nasional dalam rangka mencapai swasembada pangan yang disalurkan melalui BRI Unit Desa bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (Nugroho, 2016). Namun, program tersebut terkendala masalah kredit macet, dengan tingkat pengembalian hanya sekitar 57% selama 1976 – 1984. Pada akhirnya program tersebut

dihentikan, dan digantikan oleh program lain seperti Kredit Usaha Tani (KUT). Selain itu, ada juga program Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) pada 1990-an. Pada tahun 2000an pemerintah mengeluarkan program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) bagi para petani yang kemudian diubah namanya menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Berbagai program kredit tersebut umumnya menerapkan skema subsidi bunga, dimana pemerintah menentukan tingkat bunga yang biasanya jauh di bawah tingkat bunga pasar. Selain itu, perbankan hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur, karena seluruh dana berasal dari pemerintah sehingga seluruh risiko yang berkaitan dengan kredit ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, program-program tersebut juga menghadapi masalah yang sama yaitu tingginya kredit macet.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan dalam rangka memfasilitasi akses pembiayaan atau meningkatkan akses pinjaman bank bagi UMKM. Sasaran dari program KUR adalah UMKM yang *feasible* tetapi belum *bankable* (Nugroho, 2016). Diperkirakan peningkatan akses pada institusi keuangan akan memberikan dampak positif untuk memajukan dan memberdayakan UMKM, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan dan perannya dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan (Adam & Lestari, 2017). Karena sebagian besar rumah tangga miskin (RTM) dan berpendapatan rendah menggantungkan hidupnya pada UMKM, sehingga program KUR akan meningkatkan kapasitas UMKM dan berikutnya dapat memperkuat kemampuan untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan memperkuat daya tahan RTM dari berbagai gejolak (*shock*) seperti gagal panen, bencana alam, sakit, kematian dan ketidakstabilan ekonomi makro (Nugroho, 2016).

III. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM), yaitu suatu metode statistik yang dikembangkan untuk memperkirakan dampak intervensi atau *treatment* dengan menggunakan data non eksperimental (Guo & Fraser, 2015). Dengan metode PSM ini, terdapat dua kelompok yang diamati dengan berbagai karakteristik (kovariat) yaitu rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR (*treatment group*) dan rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program KUR (*control group*). Kesejahteraan akan diprosikan dengan pengeluaran per kapita rumah tangga, pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan rumah tangga. Beberapa variabel independen yang dijadikan sebagai kovariat atau karakteristik yang diobservasi adalah variabel sosial ekonomi rumah tangga seperti ditunjukkan pada **Tabel 1**. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang terdiri dari 134.481 rumah tangga pada 34 provinsi di Indonesia. Periode tahun 2019 dipilih karena dianggap lebih mencerminkan situasi sosial ekonomi pada kondisi normal dibandingkan tahun 2020 mengingat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Deskripsi Variabel

Variabel	Singkatan	Deskripsi
Variabel Dependen/ Outcome Variable		
a) Pengeluaran per kapita	<i>kapita</i>	Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan
b) Pengeluaran makanan	<i>food</i>	Rata-rata pengeluaran makanan rumah tangga sebulan
c) Pengeluaran bukan makanan	<i>nonfood</i>	Rata-rata pengeluaran bukan makanan rumah tangga sebulan
Variabel Treatment		
Partisipasi KUR	<i>KUR</i>	Partisipasi rumah tangga pada program KUR (<i>dummy variable</i>), 1 = menerima KUR, 0: tidak menerima KUR
Variabel Independen (Kovariat)		
a) Jenis kelamin kepala rumah tangga	<i>HH_gender</i>	Variabel dummy, 0 = laki-laki; 1 = perempuan
b) Status perkawinan kepala rumah tangga	<i>skawin</i>	Variabel dummy, 0 = belum kawin/cerai; 1 = kawin
c) Lokasi domisili	<i>domisili</i>	Variabel dummy, 0 = perkotaan; 1 = perdesaan
d) Usia kepala rumah tangga	<i>HH_age</i>	1 = <20; 2 = 21-30; 3 = 31-40; 4 = 41-50; 5 = 51-60; 6 = >60
e) Kuadrat usia	<i>usiakuad</i>	Kuadrat usia kepala rumah tangga
f) Jenis usaha	<i>jnsusaha</i>	Variabel dummy, 0 = Non pertanian; 1 = Pertanian
g) Indeks kesejahteraan	<i>wi</i>	1 = Rendah; 2= Menengah; 3= Tinggi
h) Kepemilikan rumah	<i>strumah</i>	Variabel dummy, 0 = Lainnya; 1 = Milik sendiri
i) Kepemilikan lahan/tanah	<i>sttanah</i>	Variabel dummy, 0 = Tidak memiliki; 1 = Memiliki

Sumber: Penelitian 2023

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1. Estimasi *Propensity Score*

Langkah pertama dalam analisis dampak menggunakan metode PSM adalah melakukan estimasi nilai kecenderungan (*propensity score*) pada kelompok rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR (*treatment*) dan rumah tangga yang tidak berpartisipasi pada program KUR (*control*). Untuk itu, dilakukan regresi probit dan dilihat keseimbangan kovariatnya apakah

memiliki distribusi yang serupa antara kelompok *treatment* dan *control*. Dalam hal ini dilakukan uji coba beberapa kovariat/variabel independen yang dimasukkan kedalam model sampai diperoleh kovariat yang memiliki distribusi yang seimbang antara kelompok *treatment* dan kelompok *control*.

Tabel 2. Hasil Regresi Probit Untuk Partisipasi Program KUR

Variabel	Coefficient	Standard Error	P> z
Jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT)	-.1073836	.0255172	.000
Status perkawinan KRT	.2601482	.0235269	.000
Lokasi domisili	-.0208378	.0120069	.083
Indeks kesejahteraan (<i>wealth index</i>)	.0683556	.0063617	.000
Usia KRT	.080214	.0127448	.000
Kuadrat usia	-.0001761	.0000124	.000
Kepemilikan rumah	.1004075	.0181477	.000
Kepemilikan tanah	.1290256	.0153937	.000
Jenis usaha	-.2268276	.0116313	.000

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

Berdasarkan hasil regresi probit seperti ditunjukkan pada **Tabel 2**, terdapat delapan variabel independen (kovariat) yang berpengaruh signifikan yaitu jenis kelamin kepala rumah tangga, status perkawinan kepala rumah tangga, indeks kesejahteraan (*wealth index*), usia, kuadrat usia, kepemilikan rumah, kepemilikan tanah, dan jenis usaha. Dari hasil uji signifikansi, kedelapan variabel ini diketahui memiliki nilai $P > |z|$ lebih kecil dari α (0.05), kecuali variabel lokasi domisili dengan nilai $P > |z|$ lebih besar dari 0.05 yaitu 0.083 yang menandakan kedelapan variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap partisipasi program KUR.

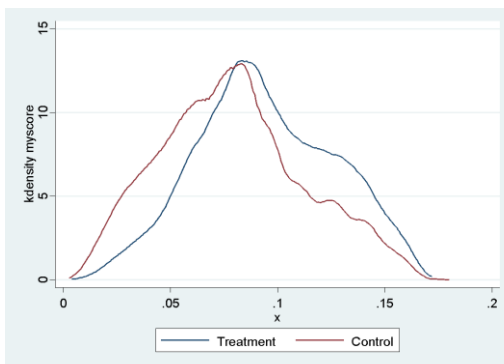
Nilai koefisien dari sembilan variabel independen menunjukkan variabel jenis kelamin kepala rumah tangga (HH_gender) memiliki nilai koefisien -.1073836, dengan arah hubungan negatif dan signifikan yang berarti bahwa rumah tangga dengan kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program KUR dibandingkan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan. Status perkawinan (skawin) memiliki nilai koefisien .2601482, yang menunjukkan hubungan positif, menandakan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang berstatus menikah lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam program KUR dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang belum menikah atau bercerai. Lokasi domisili (domisili) memiliki nilai koefisien -.0208378, menunjukkan arah hubungan negatif artinya bahwa rumah tangga yang tinggal di perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam program KUR dibandingkan rumah tangga yang tinggal di pedesaan.

Variabel usia kepala rumah tangga (HH_age) dengan nilai koefisien .080214, menunjukkan arah hubungan positif, yang artinya partisipasi program KUR akan semakin besar pada rumah tangga seiring dengan bertambahnya usia kepala rumah tangga. Namun variabel kuadrat usia memiliki koefisien negatif sebesar -.0001761 artinya semakin bertambahnya usia, dampak partisipasi program semakin menurun. Kepemilikan aset dalam bentuk rumah (strumah) dan

tanah (sttanah) memiliki nilai koefisien $.1004075$ dan $.1290256$, menunjukkan arah hubungan yang positif, menandakan rumah tangga dengan kepemilikan aset seperti rumah dan/atau tanah cenderung untuk berpartisipasi dalam program KUR dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki aset tersebut. Jenis usaha (jnsusaha) yang dijalankan memiliki nilai koefisien $-.2268276$, menandakan bahwa rumah tangga yang memiliki usaha dibidang usaha non pertanian cenderung untuk berpartisipasi dalam program KUR dibandingkan rumah tangga dengan usaha pertanian. Selain itu, kemungkinan partisipasi program KUR akan meningkat seiring dengan peningkatan indeks kesejahteraan (wi) ditunjukkan dengan nilai koefisien yang positif yaitu $.0683556$, menandakan bahwa partisipasi program akan semakin besar bersamaan dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Jika dilihat hasil statistik di atas dimana kecenderungan untuk berpartisipasi dalam program KUR lebih besar terjadi pada rumah tangga dengan kepemilikan aset (rumah dan lahan) dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas serta jenis usaha non pertanian, menandakan bahwa program KUR belum berorientasi pada masyarakat miskin dan belum menjangkau usaha pertanian secara luas.

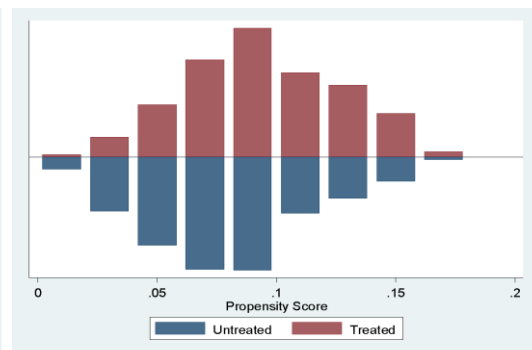
4.2. Evaluasi *Common Support*

Hasil estimasi *propensity score* menunjukkan area *common support* pada $[-.00231578, .1736098]$ dengan jumlah 10 blok. Jumlah blok ini memastikan rata-rata nilai *propensity* tidak berbeda untuk kelompok *treatment* dan *control* pada setiap blok, sehingga dapat digunakan dalam analisa dampak yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan estimasi *propensity score*, perlu dilakukan pengujian keseimbangan yang menandakan kualitas hasil *matching*. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengevaluasi grafik *common support*. Pengujian dengan cara ini efektif karena menunjukkan secara visual area *overlap* dari *propensity score* antara kelompok *treatment* dan *control* (Ogunniyi *et al.*, 2017). Menurut Imbens (2004), analisis evaluasi dampak program/kegiatan tidak mungkin dilakukan kecuali terdapat area *common support*. Selain itu, kelompok perlakuan dan kelompok kontrol harus seimbang agar PSM dapat bekerja. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam distribusi kovariat yang serupa antara kelompok yang menerima perlakuan dan kelompok pembanding.



Gambar 1. Grafik area *common support*

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

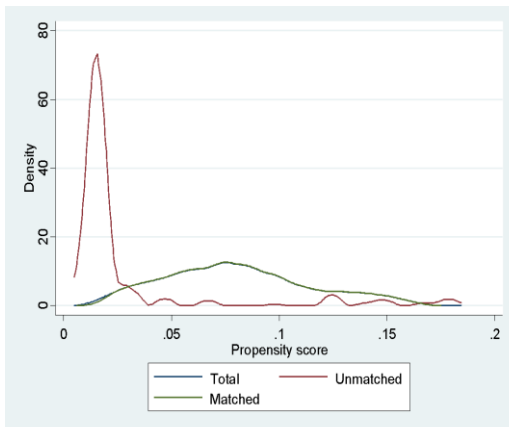


Gambar 2. Histogram *common support*

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

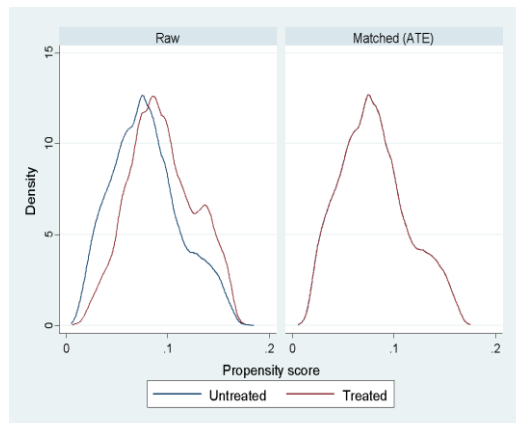
Gambar 1 menunjukkan area *common support* atau area *overlap* antara kelompok *treatment* dan kelompok *control* yang besar. Proporsi *overlap* yang besar menandakan adanya kecocokan yang baik antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol (Dehejia dan Wahba, 2002). Hasil evaluasi ini juga diperkuat dengan histogram *common support* seperti pada Gambar 2 yang menunjukkan

adanya *overlap* antara responden penerima KUR (merah) dan responden yang tidak menerima KUR (biru), *common support* memungkinkan kedua kelompok dengan karakteristik atau kovariat memiliki kemungkinan yang positif menjadi bagian dari kelompok *treatment* atau *control*. **Gambar 2** menunjukkan hasil *matching* yang baik dan distribusi *propensity score* dari karakteristik yang diamati (kovariat) antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol telah seimbang.



Gambar 3. Kernel density *common support*

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023



Gambar 4. Grafik kernel *density plot*

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

Hasil pengujian *common support* dengan fungsi Kernel *density* seperti ditunjukkan **Gambar 3** menggambarkan kurva dari sampel yang tidak memiliki pasangan (merah) baik pada kelompok *treatment* dan *control* yang kemudian dikeluarkan atau tidak digunakan dalam penghitungan *Average Treatment Effects (ATE)*. Oleh karena itu, ketika kasus yang tidak memiliki kecocokan dikeluarkan dari hasil analisis akan terlihat dua kurva yang menunjukkan total sampel (biru) dan kurva dari sampel yang memiliki pasangan (hijau) sangat dekat satu dengan yang lain, sehingga dapat dipastikan bahwa bias yang diakibatkan sampel yang tidak diubah tidak terlalu parah. Selain itu, **Gambar 4** adalah grafik sebelum dan sesudah *matching*. Terlihat bahwa setelah *matching*, *common support* menunjukkan hasil yang sangat baik dan hanya menampilkan satu garis yang menandakan tidak ada perbedaan yang besar dari kedua kelompok *treatment* dan *control*.

4.3. Evaluasi Dampak KUR Terhadap Pengeluaran Per-Kapita

Setelah dilakukan estimasi *propensity score* pada kedua kelompok *treatment* dan *control*, selanjutnya dilakukan pengukuran dampak program terhadap proksi dari variabel kesejahteraan yang pertama, yaitu pengeluaran per kapita, menggunakan empat metode *matching* yaitu *nearest neighbor*, *radius*, *stratification* dan *kernel*. Namun, untuk memudahkan analisis variabel ini ditransformasi menjadi bentuk logaritma natural (\ln).

Tabel 3. Dampak KUR Terhadap Pengeluaran Per-Kapita

Metode Matching	Jumlah Penerima KUR (<i>treatment</i>)	Jumlah Non Penerima KUR (<i>control</i>)	ATT	<i>Standard Error</i>	<i>t-score</i>
Nearest Neighbor	10852	103726	0.077	0.006	12.928
Radius	10852	123529	0.131	0.006	22.538
Stratification	10852	123619	0.076	0.006	13.221
Kernel	10850	117746	0.077	0.006	13.15

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

Tabel 3 di atas juga menampilkan nilai *Average Treatment on the Treated* (ATT) dan *t-score* dari partisipasi KUR terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga. Hasil *matching* dengan metode *nearest neighbor* menghasilkan nilai ATT 0.077 dan *t-score* 12.928 yang mengindikasikan bahwa penerima program KUR memiliki pengeluaran per kapita 7,7% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima KUR dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($p\text{-value} < 0.05$). Hasil metode *stratification* menunjukkan nilai ATT yang hampir serupa dengan metode *nearest neighbor* yaitu 0.076 dengan *t-score* 13.221 yang mengindikasikan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR memiliki pengeluaran per kapita 7,6% lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program KUR, dan secara statistik nilainya signifikan dengan tingkat signifikansi 5%. Demikian juga hasil dengan metode *kernel* yang menunjukkan nilai ATT yang hampir serupa dengan metode *nearest neighbor* dan *stratification* yaitu 0.0773 dengan *t-score* 13.15 yang mengindikasikan rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR memiliki pengeluaran per kapita 7,7% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program KUR dan secara statistik nilainya signifikan. Hasil metode *radius matching* menghasilkan nilai ATT 0.131 dengan *t-score* 22.538, yang menandakan bahwa rumah tangga penerima program KUR memiliki pengeluaran per kapita 13,1% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima KUR, dan secara statistik nilainya signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi program KUR berdampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Indra (2022) yang menyebut bahwa penerima KUR memiliki pengeluaran per kapita lebih tinggi sekitar 4,7%. Serta selaras dengan penelitian Setyari (2012) yang menyebut kredit mikro berdampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita penerima KUR.

4.4. Evaluasi Dampak KUR Terhadap Pengeluaran Makanan

Metode serupa dilakukan untuk mengukur dampak program KUR terhadap pengeluaran makanan, dengan terlebih dahulu mengubah variabel dependen pengeluaran makanan menjadi logaritma natural. Dari hasil *matching* dengan empat metode *matching* diperoleh hasil berikut:

Tabel 3. Dampak KUR Terhadap Pengeluaran Per-Kapita

Metode Matching	Jumlah Penerima KUR (<i>treatment</i>)	Jumlah Non Penerima KUR (<i>control</i>)	ATT	<i>Standard Error</i>	<i>t-score</i>
Nearest Neighbor	10852	103726	0.095	0.005	18.021
Radius	10852	123529	0.142	0.005	27.267
Stratification	10852	123619	0.105	0.005	20.785
Kernel	10850	117746	0.099	0.005	19.26

Sumber: Hasil analisis STATA, 2023

Tabel 4 menampilkan nilai *Average Treatment on the Treated* (ATT) dan *t-score* dari partisipasi KUR terhadap rata-rata pengeluaran makanan rumah tangga sebulan. Hasil *matching* dengan metode *nearest neighbor* nilai ATT adalah 0.095 dan *t-score* 18.021 yang mengindikasikan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi dalam program KUR memiliki pengeluaran makanan rata-rata sebulan 9,5% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program KUR dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% ($p\text{-value} < 0.05$). Hasil *matching* dengan metode *radius* menghasilkan nilai ATT 0.142 dengan *t-score* 27.267, yang menandakan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi pada program KUR memiliki pengeluaran makanan rata-rata sebulan 14,2% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi pada program, dan secara statistik nilainya signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil metode *stratification matching* menunjukkan nilai ATT 0.105 dan *t-score* 20.785 yang mengindikasikan bahwa rumah tangga yang berpartisipasi pada program KUR memiliki pengeluaran makanan rata-rata sebulan 10,5% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program KUR, dan secara statistik nilainya signifikan dengan tingkat signifikansi 5%. Demikian juga hasil metode *kernel* yang menunjukkan nilai ATT hampir serupa dengan metode *nearest neighbor* yaitu 0.099 dan *t-score* 19.26 yang mengindikasikan rumah tangga yang berpartisipasi pada program KUR memiliki pengeluaran makanan 9,9% lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi pada program KUR dan secara statistik nilainya signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa program KUR berdampak positif dan signifikan terhadap rata-rata pengeluaran makanan sebulan rumah tangga. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putra (2019) yang menyebut bahwa penerima KUR memiliki pengeluaran makanan yang lebih tinggi sekitar 4%. Serta mendukung penelitian Primananda (2021) yang menyimpulkan bahwa KUR berdampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran makanan rumah tangga.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Secara umum, partisipasi program KUR berdampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima program berdasarkan indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran makanan dan pengeluaran bukan makanan. Dampak program KUR terhadap indikator pengeluaran non makanan menjadi yang terbesar dari ketiga variabel *outcome* yang mencapai 18,3% hingga 28,1% lebih tinggi dibandingkan non penerima KUR. Namun demikian,

program KUR belum sepenuhnya berpihak pada rumah tangga miskin (RTM) yang terlihat dari partisipasi program yang didominasi oleh kelompok masyarakat kelas menengah dan tinggi (desil 4-10) yang mencapai 68,55%. Sementara partisipasi program oleh rumah tangga miskin (desil 1-3) hanya sekitar 31,45%. Selain itu, hasil regresi probit juga menunjukkan bahwa indeks kesejahteraan (*wealth index*) memiliki koefisien .0683556 dengan $P > |z| .000$ yang menunjukkan bahwa partisipasi program KUR akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, alokasi KUR pada sektor pertanian juga masih rendah, yang ditunjukkan dari hasil koefisien regresi probit sebesar $-.2268276$ yang menandakan penduduk yang memiliki usaha non pertanian memiliki probabilitas lebih besar untuk berpartisipasi dalam program KUR dibanding yang memiliki usaha pertanian. Serta, variabel lokasi domisili yang memiliki koefisien regresi probit $-.0208378$, namun nilai $P > |z|$ lebih besar dari 0.05 yaitu 0.083 menandakan bahwa masyarakat di daerah perkotaan memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam program KUR, namun secara umum tidak signifikan. Dengan kata lain, program KUR belum dapat secara efektif menjangkau wilayah pedesaan dan sektor pertanian, dimana secara proporsi penduduk miskin cenderung berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Sehingga, hal ini dapat menghambat kinerja program dalam pengentasan kemiskinan.

Masih rendahnya partisipasi rumah tangga miskin dalam program berkaitan dengan desain program yang tidak spesifik ditujukan kepada rumah tangga miskin. Selain itu, penyelenggara KUR tetap terikat dengan aturan-aturan *microprudential* perbankan, sehingga bank lebih suka menyalurkan KUR kepada UMKM yang prospektif dan dianggap mampu mengembalikan pinjaman, karena menyalurkan KUR ke UMKM yang dimiliki rumah tangga miskin dipandang akan meningkatkan risiko bank seperti naiknya NPL.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan-temuan tersebut, beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan lembaga keuangan penyalur KUR diharapkan memperluas jangkauan program terutama kepada kelompok masyarakat atau rumah tangga miskin dan rumah tangga di pedesaan terutama yang melakukan usaha di sektor-sektor usaha produktif seperti pertanian, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili di pedesaan dan yang melakukan usaha sektor pertanian memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk berpartisipasi dalam program.
- 2) Mendorong peran pemerintah daerah dalam program KUR, diantaranya meningkatkan pendataan UMKM dan mendorong kesiapan calon penerima KUR melalui pemberian bantuan asistensi/pelatihan kepada calon peminjam/penerima KUR terutama dari kelompok rumah tangga miskin. Salah satunya adalah dengan pelatihan yang bersifat praktis, seperti pelatihan penggunaan teknologi informasi mengenai pemasaran dan teknik atau metode yang berkaitan dengan produksi. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan dana program sesuai untuk tujuan produktif dan penerima KUR yang kurang teredukasi agar memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan pengeluaran makanan maupun pengeluaran non makanan.
- 3) Mendorong sinergi program KUR dengan program pembiayaan mikro lain atau juga program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Aronsson, T., dan Lofgren, KG. (2007). *Welfare theory: history and modern results*, Department of Economics Umea University, Sweden.
- Baujard, A. (2013): Welfare Economics, WP 1333, *GATE Groupe d'Analyse et de Théorie Économique Lyon-St Étienne*, France.
- Blackorby, C., Bossert, W., dan Donaldson, D. (2002). *Utilitarianism and the theory of justice in Arrow, K.J., Sen, A.K., dan Suzumura, K. (eds) Handbook of social choice and welfare vol 1, Handbook in Economics 19, North-Holland.*
- Caliendo, M. dan Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching, *Journal of Economic Survey*, 22(1): 31-72.
- Chemin, M. (2008). The benefits and costs of microfinance: Evidence from Bangladesh, *The Journal of Development Studies*, 44(4): 463-484.
- Cuong, N.V. (2008). Is a governmental micro-credit program for the poor is really pro-poor? Evidence from Vietnam, *The Developing Economies*, 16(2): 151-187.
- Dehejia, R.H., dan Wahba, S. (2002). Propensity score matching methods for nonexperimental causal studies, *The Review of Economics and Statistics*, 84(1): 151-161.
- Guo, S., dan Fraser, M.W. (2015). *Propensity score analysis: statistical methods and application*, Advance Quantitative Techniques in Social Sciences Series 11, SAGE Publications, California, USA.
- Hulme, D. dan Mosley, P. (1996). *Finance against poverty*, London: Routledge.
- Imbens, G.W. (2004). Nonparametric estimation of average treatment effects under exogeneity: a review, *The Review of Economics and Statistics*, 86(1): 4-29.
- Indra, A.K. (2022). *Analisa dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan penerima kredit di Indonesia*, Tesis Magister yang tidak diterbitkan, Universitas Andalas, Padang.
- Kenworthy, L. (1999). Do social-welfare policies reduce poverty? A cross-national assessment, *Social Forces*, 77 (3): 1119-1139.
- Khandker, S.R., Samad, H. A., Khan, Z. H. (1998). Income and employment effects of micro-credit programs: village level evidence from Bangladesh, *The Journal of Development Studies*, 35(2): 96-124, DOI: 10.1080/00220389808422566
- Lipton, M., dan Ravallion, M. (1993). Poverty and Policy, *Policy Research Working Papers*, Policy Research Department, The World Bank.
- Nghiem, H.S., Coelli, T., dan Rao, P. (2007). The welfare effects of microfinance in Vietnam: Empirical results from a quasi-experiment survey, *Paper contributed to the 51st Annual Conference of the Australian Agriculture and Resources Economics Society*, 13-16 February 2007, Queenstown, New Zealand.
- Nugroho, A.E. (2016). *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia*, LIPI Press, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Ekonomi, Jakarta.
- Ogunniyi, A., Oluseyi, O.K., Adeyemi, O., Kabir, S., Philips, F. (2017). Scaling up agricultural innovation for inclusive livelihood and productivity outcomes in Sub Saharan Africa: the case of Nigeria, *African Development Review*, 29(2): 121-134.
- Panjaitan-Drioadisuryo, R.D., dan Cloud K. (1999). Gender, self-employment and microcredit

- programs, an Indonesian case study, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 39: 769-779.
- Primananda, M.A. (2021). *Hubungan penerimaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pengeluaran rumah tangga miskin: Analisis data Susenas 2016 hingga 2018*, Tesis yang tidak diterbitkan, Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tersedia dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/206791>, [diakses 2 Februari 2023].
- Putra, I.K. (2019). *Evaluasi dampak Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali*, Tesis Magister yang tidak diterbitkan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tersedia dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/182116>, [diakses 2 Februari 2023].
- Quach, M.H., Mullineux, A.W., dan Murinde, V. (2005). *Access to credit and household poverty reduction in rural Vietnam: a cross-sectional study*, Edgbaston, UK: The Birmingham Business School, The University of Birmingham.
- Setyari, N.P.W. (2012). Evaluasi dampak kredit mikro terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia: analisis data panel, *JEKT*, 5 (2):141-150.
- Tambunan, T. (2015). Financial inclusion, financial education, and financial regulation: A story from Indonesia, *ADB Working Paper Series*, No 535, Tokyo, Asian Development Bank Institute.
- Timlin, M.F. (1949). Review article – Theories of welfare economics, *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, 15 (14): 551-559.
- UNDP. (2022). *2022 Global multidimensional poverty index (MPI) – Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty*, New York, Tersedia dari <https://hdr.undp.org/content/2022-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indices/MPI>, diakses dan diunduh pada 2 April 2023.
- World Bank. (2017). Indonesia economic quarterly – staying the course, *The World Bank*, Maret 2017.
- Wulandari, K., dan Rosfiantika, E. (2018). Poverty alleviation and community welfare: a case study in Bondowoso Regency, East Java, Indonesia, *Asian Journal for Poverty Studies*, 4 (1): 1-6.